

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM LEMBAGA PERKREDITAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA

Wayan Cipta¹, Made Suci², Gede Putu Agus Jana Susila³, Ni Luh Wayan Sayang Telagawathi⁴,
Ni Made Dwi Ariani Mayasari⁵, Made Amanda Dewanti⁶

^{1,2,3,4,5,6}Jurusan Manajemen UNDIKSHA

Email: wayan.cipta@undiksha.ac.id

ABSTRACT

This community service was conducted with the aim of improving the knowledge and understanding of LPD and Bumdes managers regarding financial report preparation and risk management. The method used for this activity is training and mentoring, which can enhance the ability to prepare financial reports and manage risks, ensuring that LPD and Bumdes managers can be accountable. The training and mentoring activities were carried out in three stages, namely (1) the preparation phase, to provide an understanding of financial reporting and risk management, (2) the training phase, to enhance skills in preparing financial reports and managing risks, and (3) the evaluation phase. This community service activity has resulted in knowledge and understanding of financial report preparation and risk management that can be comprehended by LPD and Bumdes managers, thereby improving human resource capabilities.

Keywords: financial reporting, risk management, Bumdes, LPD

ABSTRAK

Pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola LPD dan Bumdes tentang penyusunan laporan keuangan dan manajemen risiko. Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah metode pelatihan dan pendampingan yang dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan dan manajemen risiko sehingga pengelola LPD dan Bumdes dapat mempertanggungjawabkan dengan baik. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui 3 tiga tahap, yaitu (1) tahap persiapan pembinaan, untuk memberikan pemahaman tentang laporan keuangan dan manajemen risiko, (2) tahap kegiatan latihan, untuk peningkatan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan dan manajemen risiko, serta (3) tahap evaluasi. Kegiatan pengabdian ini telah menghasilkan suatu pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan dan manajemen risiko yang bisa dimengerti dan dipahami oleh pengelola LPD dan Bumdes, sehingga dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Kata kunci: laporan keuangan, manajemen risiko, Bumdes, LPD

PENDAHULUAN

Desa merupakan skala pemerintahan terkecil yang memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga berpengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah, 2016), namun seiring perkembangan jaman dari tahun ke tahun jumlah penduduk desa banyak yang melakukan urban di perkotaan, tahun 2020 ini diproyeksikan oleh Worldometers jumlah penduduk perkotaan akan semakin meningkat mencapai kira-kira 56,4%, kondisi ini dikarenakan potensi yang dimiliki

oleh pedesaan yang luas wilayahnya berbanding terbalik dengan luas wilayah perkotaan belum tergarap dengan baik. Disisi lain situasi desa dianggap memiliki situasi yang esensial dalam kemajuan negara mengingat desa merupakan alasan untuk mengenali masalah-masalah kawasan lokal hingga penataan dan pengakuan destinasi negara di tingkat desa (Sidik, 2015). Terjadinya kesenjangan antara kota dan desa dalam segala bidang baik dari segi ekonomi, pendidikan, fasilitas-fasilitas dan kesejahteraan masyarakatnya yang mendorong masyarakat pedesaan untuk melakukan urbanisasi, hal inilah yang perlu diperhatikan agar pemerintah melakukan percepatan pembangunan di

pedesaan, namun sebenarnya pembangunan di pedesaan selama ini sudah berjalan hanya masih banyak mengalami kegagalan-kegagalan hal ini dikarenakan banyaknya campur tangan pemerintah, yang berdampak pada terhambatnya inovasi dan kreativitas masyarakat wilayah desa setempat dalam administrasi perekonomian desa. Salah satu pendekatan untuk mendorong dan mempercepat perbaikan desa adalah bahwa pemerintah desa diberi kewenangan oleh pemerintahan pusat untuk secara mandiri menangani lingkup desa melalui lembaga perekonomian di tingkat desa (Budiono, 2015). Salah satu lembaga keuangan berbasis adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan cara menciptakan dan memberikan pelayanan di bidang keuangan. LPD merupakan salah satu kearifan lokal Bali yang dikelola dari, oleh, dan untuk rakyat (krama). Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD menyatakan bahwa LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa.

Selain LPD, lembaga ekonomi desa yang sedang mendapat perhatian adalah badan usaha milik desa (Bumdes). Pembentukan Bumdes dimaksudkan bukan saja untuk menjadi motor penggerak roda-roda perekonomian desa tetapi juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan Desa. Untuk itu pengelolaan keuangan desa ini harus ditangani secara profesional, sehingga kedua maksud tersebut dapat dicapai (Soleh & Rochmansyah, 2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 (PP 11 Tahun 2021) tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021. Aset Bumdes berbeda dengan Aset Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan Aset Bumdes

adalah harta atau kekayaan milik Bumdes, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil. Bumdes adalah salah satu bentuk social enterprise, yaitu lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah social, caranya dengan menciptakan nilai tambah, mengelola potensi dan aset serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga.

Menurut (Nurlan, 2008) laporan keuangan merupakan lampiran informasi tambahan mengenai kinerja sebuah instansi pemerintah. Pengungkapan informasi kinerja ini relevan dengan perubahan paradigma akan penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan cara mengidentifikasi secara jelas bentuk keluaran (output) dari setiap rangkaian kegiatan beserta hasil dari kegiatan yang telah dilakukan (income) yang tertera pada laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, LPD dan Bumdes wajib untuk membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha Bumdes setiap bulan dengan jujur dan transparan. Bumdes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha Bumdes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Secara umum, prinsip pembukuan keuangan LPD dan Bumdes tidak berbeda dengan pembukuan keuangan lembaga lain pada umumnya. LPD dan Bumdes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal Bumdes adalah pengelola dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, perbankan, dan masyarakat yang

memberikan penyertaan modal, serta petugas pajak.

Tujuan pembukuan keuangan menurut (Fess, 2005) untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah. Informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan terkait operasi bisnis, pengendalian aset, dan penentuan profitabilitas perusahaan.

Tujuan pembukuan keuangan secara umum adalah: Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur permodalan; Untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa dihindari; Untuk mengetahui kondisi persediaan barang/jasa setiap saat. Sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi manajemen persediaan; Untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana LPD dan Bumdes, sehingga bisa mengevaluasi kinerja keuangan LPD dan Bumdes.

Secara garis besar, ada empat istilah umum akuntansi yang digunakan dalam pembukuan LPD dan Bumdes, yakni: Harta, Hutang, Biaya, dan Pendapatan. Harta dalam pengertian akuntansi adalah semua barang dan hak milik perusahaan (LPD dan Bumdes) serta sumber ekonomi lainnya. Harta dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni harta tetap, harta lancar, dan harta tidak berwujud. Hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar pada masa mendatang (sesuai dengan kesepakatan yang dibuat) akibat dari suatu transaksi. Berdasarkan waktu pembayaran, hutang dapat dibedakan menjadi dua yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Pendapatan adalah peningkatan harta/aktiva perusahaan sebagai akibat terjadinya transaksi yang menguntungkan. Misalnya, membeli produk hasil pertanian per kg harganya Rp.10.000 dan dijual di pasar dengan harga per kg Rp.12.500. Maka selisih antara harga beli dengan harga jual sebesar Rp.2.500 merupakan pendapatan. Biaya adalah harta yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam satu periode tertentu yang habis terpakai. Terdapat tiga jenis

biaya yang umumnya harus dibayar yaitu: Harga Pokok Penjualan, Biaya operasi dan biaya lain-lain.

Proses pembukuan bisa dilakukan dengan sistem yang diterapkan dalam akuntansi sederhana, yakni dengan membuat dan mengumpulkan bukti transaksi, seperti kwitansi, nota atau bon pembelian maupun penjualan. Dari hasil mengumpulkan bukti transaksi kemudian menyusun buku kas harian atau arus kas (*Cash Flow*) ke dalam bentuk buku kas harian. Dari Buku Kas Harian ini dapat diketahui berapa besarnya uang masuk dan keluar serta saldo atau sisa dana dalam setiap harinya. Untuk memudahkan penggunaan buku harian kas diperlukan membuat sebuah kelompok rekening yang akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam membuat, mengelompokkan dan menyusun pembukuan. Apabila mengalami perkembangan sehingga transaksinya bertambah banyak setiap harinya, maka pembukuannya dapat ditambah dengan membuat laporan neraca saldo dan laporan keuangan. Laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan secara keseluruhan selama satu periode (biasanya satu tahun). Laporan keuangan akuntansi umum terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan laporan perubahan modal. Proses pembukuan untuk bisa dilakukan dengan sistem yang diterapkan dalam akuntansi sederhana, yakni dengan membuat dan mengumpulkan bukti transaksi, seperti kwitansi, nota atau bon pembelian maupun penjualan. Dari hasil mengumpulkan bukti transaksi kemudian menyusun buku kas harian atau arus kas (*Cash Flow*) ke dalam bentuk buku kas harian. Dari Buku Kas Harian ini dapat diketahui berapa besarnya uang masuk dan keluar serta saldo atau sisa dana dalam setiap harinya. Untuk memudahkan penggunaan buku harian kas diperlukan membuat sebuah kelompok rekening yang akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam membuat, mengelompokkan dan menyusun pembukuan. Apabila mengalami perkembangan sehingga transaksinya bertambah banyak setiap harinya, maka pembukuannya dapat ditambah dengan membuat laporan neraca

saldo dan laporan keuangan. Laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan secara keseluruhan selama satu periode (biasanya satu tahun). Laporan keuangan akuntansi umum terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan laporan perubahan modal. Dalam kegiatan pengabdian ini, pelatihan laporan keuangan yang digunakan yaitu laporan keuangan sederhana seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar Rekening

Group	Kelompok	No. Rek.	Nama Rekening
1	HARTA	111	Kas
		112	Bank
		113	Persediaan
		114	Piutang
		115	Inventaris
2	HUTANG	211	Hutang Bank
		212	Hutang Non Bank
3	MODAL	311	Modal Usaha
		312	Penyertaan Modal
4	PENDAPATAN	411	Laba Usaha
		412	Bunga Tabungan
5	BIAYA	511	Biaya Administrasi
		512	Biaya Rapat
		513	Biaya Transport
		514	Biaya Penyusutan

Tabel 2. Neraca Saldo

NERACA SALDO			
Periode 31 Desember 2024			
No. Rek.	Nama Rekening	Debet	Kredit
111	Kas		

112	Bank		
113	Persediaan		
114	Piutang		
115	Inventaris		
	dst		

Tabel 3. Buku Kas Harian

BUKU KAS HARIAN					
Periode 31 Desember 20					
Tgl	Uraian	No. Bukti	Debet	Kredit	Saldo

Tabel 4. Laporan Laba Rugi

LAPORAN LABA RUGI	
Periode 31 Desember 2024	
Pendapatan:	
Jumlah Penjualan	Rp.
Pendapatan Bunga	Rp.
Jumlah Pendapatan	Rp.
Biaya-biaya:	
Biaya Administrasi dan Operasional	Rp.
Laba/Rugi Kotor	Rp.
Biaya Pajak	Rp.
Laba/Rugi Bersih	Rp.

Tabel 5. Laporan Perubahan Modal

LAPORAN PERUBAHAN MODAL	
Periode 31 Desember 2024	
Modal Awal:	
Hibah dari Pemkab	Rp.
Penyertaan Modal Masyarakat	Rp.
Jumlah Modal Awal	Rp.
Laba yang tidak dibagi	Rp.
Tambahan Modal:	
Pemdes	Rp.
Masyarakat	Rp.
Jumlah Modal Akhir	Rp.

Tabel 6. Laporan Neraca

LAPORAN NERACA					
Periode 31 Desember 2024					
No. Rek.	Nama Rekening	Jumlah	No. Rek	Nama Rekening	Jumlah
	AKTIVA LANCAR			HUTANG LANCAR	
111	Kas	Rp.	211	Hutang Usaha	Rp.
112	Bank	Rp.	212	Hutang Non Bank	Rp.
113	Persediaan	Rp.		HUTANG JANGKA PANJANG	
114	Piutang	Rp.	221	Hutang Bank	Rp.
115	Inventaris	Rp.			
	AKTIVA TETAP			MODAL	
121	Gedung	Rp.	311	Hibah dari Pemkab	Rp.
122	Penyusutan Gedung	Rp.	312	Laba yang tidak dibagi	Rp.
123	Tanah	Rp.			
	Jumlah	Rp.		Jumlah	Rp.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola LPD dan Bumdes dalam menjalankan tugasnya diantaranya penyusunan laporan keuangan dan manajemen risiko. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode yang digunakan adalah ceramah dan pelatihan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dirancang dengan cara kerja yang sistematis meliputi: (1) kegiatan pembinaan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pembentukan cara pandang dan karakter yang berorientasi pada cara kerja profesional, (2) kegiatan pelatihan, yaitu untuk meningkatkan keterampilan (skill) terutama keterampilan dalam menyusun laporan keuangan dan manajemen risiko serta (3) kegiatan pendampingan, yaitu kegiatan yang dilakukan pasca pelatihan untuk memastikan apa yang dilatihkan sudah mampu dipraktikkan dengan baik dan benar.

Sebagai langkah awal dalam realisasi pemecahan masalah ini adalah melakukan

observasi dan orientasi lapangan dengan mengadakan pertemuan bersama antara pelaksana P2M dan pengelola LPD dan Bumdes untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelola LPD dan Bumdes. Subjek kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan manajemen risiko LPD dan Bumdes Desa Belimbing. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui 3 tiga tahap, yaitu (1) tahap persiapan pembinaan, untuk memberikan pemahaman tentang laporan keuangan dan manajemen risiko yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pembentukan cara pandang dan karakter yang berorientasi pada cara kerja profesional, (2) tahap kegiatan pelatihan, untuk peningkatan keterampilan terutama keterampilan dalam analisa kredit dan (3) tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi akan dilakukan pendampingan pemecahan permasalahan yang dialami pengelola LPD dan Bumdes serta memastikan apa yang dilatihkan sudah mampu dipraktikkan dengan baik dan benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, dimana yang menjadi mitranya adalah pengelola LPD dan Bumdes di Desa Belimbing. Kegiatan ini dilakukan bermula dari survey awal ke lokasi calon tempat pengabdian yang mana sebelumnya pengabdi menghubungi mitra dengan maksud agar pengelola LPD dan Bumdes mendapat pelatihan pencatatan laporan keuangan dan manajemen risiko. Hal ini dilakukan karena anggotanya merasa sulit untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pencatatan laporan keuangan dengan baik yang hanya berpedoman pada buku kas masuk dan buku kas keluar serta manajemen risiko. Hal ini dikarenakan pencatata buku kas masuk dan buku kas keluar semua unit kegiatan digabung menjadi satu, sehingga ketika ditanya laporan keuangan dimasing-masing unit pengelola hanya menjelaskan sisa kas. Kegiatan program pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan memiliki tujuan untuk untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman pengelola LPD dan Bumdes terhadap laporan keuangan dan manajemen risiko dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pengelola LPD dan Bumdes, pentingnya pengelolaan keuangan dan manajemen risiko.

Fokus kegiatan ini adalah memberikan pelatihan pencatatan laporan keuangan di masing-masing unit kegiatan. Kegiatan pelatihan diikuti oleh seluruh pengelola LPD dan Bumdes yang diselenggarakan di kantor desa, selanjutnya selama dua minggu berturut turut akan diadakan pendampingan guna mengevaluasi hasil pelatihan yang telah dilakukan.

Untuk dapat menggambarkan perbedaan antara pencatatan pembukuan sederhana dengan akuntansi ada baiknya kami akan mencoba untuk menjabarkan istilah akuntansi secara umum, akuntansi adalah suatu bahasa bisnis dari suatu proses pencatatan, klasifikasi dan komunikasi dari data keuangan yang berupa penjualan, beban-beban, dan informasi

keuangan penting lainnya kepada majemen. Sedangkan pembukuan merupakan bagian dari akuntansi yaitu sebatas proses penacatatan saja, sedangkan akuntansi cakupannya luas berupa identifikasi dan juga komunikasi. Dari uraina tersebut diatas dapat kita bedakan antara Akuntansi dan pembukuan secara global. Pembukuan sederhana merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses akuntansi. Untuk perusahaan yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan keuangan, cukup menyediakan buku memorial harian sebagai pengganti bukti pembukuan dan mengumpulkan segala jenis transaksi harian. Selanjutnya dilakukan metode tata buku tunggal atau ganda sesuai dengan kebutuhan neraca awal dan neraca akhir dapat dibuat melalui inventarisasi. Laba kemudian dapat dihitung melalui perbandingan modal awal dan modal akhir disertai penyesuaian. Selanjutnya pencatatan menggunakan komputer akan lebih membantu karena data akan lebih akurat dan tertata rapi.

LPD dan Bumdes Desa Belimbing memiliki tujuan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan tersebut yang akan digunakan sebagai patokan agar LPD dan Bumdes berjalan sesuai yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan. LPD dan Bumdes Desa belimbing dibentuk untuk menjadi wadah usaha yang memiliki potensi agar dapat dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Maksud didirikannya LPD dan Bumdes supaya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dapat membantu percepatan pembangunan desa, salah satu sumber pendapatan asli desa, dan menggerakkan perekonomian rakyat. Aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan guna menjalankan usahanya. Aktivitas tersebut ada dalam setiap siklus pada unit usahanya. Siklus bisnis dari penjualan barang dan penyaluran kredit dimulai dari siklus pengeluaran kas, produksi, penggajian, penerimaan kas. Yang pertama siklus pengeluaran kas memiliki aktivitas pembelian bahan baku, pemasaran, dan pencatatan kas. Kemudian siklus produksi terdapat aktivitas mendesain produk dan

operasi produksi. Selanjutnya di dalam siklus penggajian memiliki aktivitas kompensasi atau penggajian.

Yang terakhir adalah siklus pengeluaran aktivitas, didalamnya mempunyai aktivitas penerimaan pesanan dan penerimaan kas. Setiap organisasi memiliki siklus operasional ketika menjalankan aktivitas bisnis yang di dalamnya pasti terdapat suatu risiko dari setiap siklusnya. Risiko yang mungkin terjadi salah satunya adalah tindak kecurangan. Tindak kecurangan bertujuan untuk mengelabui orang lain demi memperkaya diri sendiri (Utami & Kartika, 2019). Siklus dimulai dari pengeluaran kas yang didalamnya terdapat aktivitas-aktivitas terkait kas yang keluar. Yang pertama ialah aktivitas pembelian bahan baku.

LPD dan Bumdes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Dalam melakukan pemberian kredit, haruslah menganut prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan memberikan resiko yang besar. Resiko tersebut berupa resiko tidak tertagihnya piutang dan terlambatnya penerimaan piutang dari jadwal, sehingga akan menimbulkan kredit macet. Apabila kredit macetnya meningkat, maka pihak LPD dan Bumdes akan mengalami kesulitan dalam likuiditasnya jika sewaktu-waktu terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar. Agar nantinya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan seperti kredit macet maka sebelum melakukan pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur 5C (The Five of Credit), yaitu character, capacity, capital, collateral and condition. Prinsip itu adalah bagian integral dari tahapan analisa kredit.



Gambar 1 Koordinasi dengan kepala desa



Gambar 2. Diskusi persiapan pelatihan dengan Kepala Desa



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan



Gambar 4. Kegiatan Pelatihan



Gambar 5. Kegiatan Pendampingan



Gambar 6. Kegiatan Pendampingan

SIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja yang dijadwalkan. Selama pelaksanaan pelatihan dan beberapa kali pendampingan, respon dari pengelola LPD dan Bumdes sangat positif, selalu mengikuti pelatihan dan pendampingan dengan semangat dan sangat terasa kebermanfaatannya karena awalnya pengelola

kurang paham menjadi paham dan mereka selalu menginginkan adanya kegiatan seperti ini secara kontinyu. Kegiatan pelatihan manajemen kredit dan manajemen risiko akan memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kinerja Unit Simpan Pinjam pada Bumdes dan LPD jika dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan. Untuk itu diharapkan agar kegiatan ini dilaksanakan di tahun mendatang. Selain itu, materi yang terkait tata kelola, seperti manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen keuangan serta manajemen operasi juga penting untuk diberikan kepada pengelola. Kegiatan pengabdian ini telah menghasilkan suatu pengetahuan dan keterampilan mengenai pencatatan laporan keuangan dan manajemen resiko yang sangat mudah dimengerti oleh pengelola, sehingga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada unit simpan pinjam dan diharapkan dapat berguna dan dapat diimplementasikan oleh pengelola sehingga dapat meningkatkan kemampuan kerja secara profesional.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- Fess, W. R. (2005). *Accounting/Pengantar Akuntansi* (21th ed.). Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Cetakan Ke). CV Andi Offset.
- Nurlan, D. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Cetakan Pe). PT Indeks.
- Sa'dullah. (2016). Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RepublikIndonesia. <http://www.kemendes.go.id/index.php/view/detil/1799/pentingnya-media-audio-visual-dalam-pengembangan->

kawasan-perdesaan-agropolitan.

Accessed 18 July 2016.

- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 19(2), 115–131.
- Soleh, C., & Rochmansyah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia.
- Utami, I. W., & Kartika, T. P. D. (2019). Determinants of Financial Distress in Property and Real. *The Indonesian Accounting Review*, 9(1), 109–120.